

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Kemiskinan**

###### **a. Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan mencerminkan keadaan dimana individu mengalami defisit kepemilikan dan pendapatan yang terbatas, atau secara lebih terperinci menandakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan primer manusia, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Beberapa konsepsi mendeskripsikan situasi kekurangan ini, termasuk definisi yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum guna memperoleh hidup yang layak (Bhinadi, 2017). Beberapa definisi terkait kemiskinan yaitu :

1. Bappenas mengartikan kemiskinan sebagai keadaan di mana individu atau kelompok individu tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka guna menjaga dan meningkatkan taraf hidup yang layak (Chalid & Yusuf, 2014).
2. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, terdapat empat pola kemiskinan yang dapat diidentifikasi. Pertama, ada kemiskinan yang persisten, yang merupakan kondisi kronis atau menurun secara bertahap dari generasi ke

generasi. Kedua, terdapat kemiskinan siklus, yang terkait dengan fluktuasi ekonomi secara keseluruhan. Ketiga, ada kemiskinan musiman yang mempengaruhi nelayan dan petani selama periode tertentu. Terakhir, ada kemiskinan akidental yang muncul karena dampak bencana alam, yang dapat mengakibatkan penurunan signifikan dalam tingkat kesejahteraan (Mafahir & Soelistiyo, 2017).

3. Al-Ghazali mengartikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya secara substansial (Susilawati, 2018).

Dari berbagai definisi yang telah dibahas, kesimpulan dapat ditarik bahwa kemiskinan bukan hanya mencakup keterbatasan finansial semata, tetapi juga meliputi aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, perlakuan hukum yang adil, dan elemen-elemen lain yang mempengaruhi kesejahteraan individu secara holistik (N. Dewi, 2017).

#### **b. Indikator Kemiskinan**

Untuk mencapai penyelesaian terhadap masalah kemiskinan, penting bagi kita untuk secara cermat meneliti indikator-indikator kemiskinan yang relevan. Indikator-indikator tersebut dapat menjadi acuan, seperti yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut (BPS Kebumen, 2024):

- 1) Garis Kemiskinan (GK) merupakan ukuran nilai uang minimum yang diperlukan oleh seseorang dalam satu bulan untuk memenuhi kebutuhan esensialnya, baik itu dalam hal makanan maupun non-makanan. GK terbagi menjadi dua komponen utama: Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang mencakup kebutuhan pangan dasar, dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) yang mencakup kebutuhan non-pangan seperti pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita bulanan di bawah nilai Garis Kemiskinan (GK) dianggap sebagai penduduk miskin menurut standar ini (Ali et al., 2015).
- 2) Persentase Penduduk Miskin atau *Head Count Indeks* (HCI-P0) mengindikasikan proporsi penduduk yang hidup di bawah ambang batas kemiskinan.
- 3) Indikator ketimpangan yang digunakan oleh Bank Dunia adalah persentase pengeluaran dari kelompok 40% penduduk terbawah sebagai salah satu ukuran ketimpangan ekonomi yang signifikan.

Badan pusat statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank (BPS Kebumen, 2024). Dengan pendekatan yang memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

makanan dan bukan makanann yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, garis kemiskinan digunakan unutupuk melihat penduduk yang dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Dengan begitu ada beberapa keadaan dimana indikator tersebut menggambarkan sebuah kemiskinan yang terjadi sesuai dengan keterangan dari Badan Pusat Statistik, sebagai berikut (A. M. Ginting & Rasbin, 2019):

- a) Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal.
- b) Kesulitan akses terhadap kebutuhan penting seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi.
- c) Ketidakpastian tentang masa depan karena kurangnya investasi dalam pendidikan dan keluarga.
- d) Rentan terhadap berbagai goncangan, baik yang bersifat individual maupun massal.
- e) Kualitas sumber daya manusia rendah dan sumber daya alam yang terbatas.
- f) Kurangnya penghargaan terhadap kegiatan sosial masyarakat.
- g) Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan sumber penghasilan yang berkelanjutan.
- h) Cacat fisik atau mental.

- i) Ketidakmampuan sosial dan ketergantungan, seperti anak terlantar, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, serta kelompok-kelompok marginal dan terpencil.

### **c. Penyebab Kemiskinan**

Menurut World Bank, salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Kemiskinan juga sering terkait dengan tingkat pengangguran yang tinggi, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Menurut Bappeda provinsi Riau, kemiskinan bisa disebabkan oleh kurangnya akses terhadap alat untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta kesulitan dalam memperoleh aset yang mendukung pendidikan dan pekerjaan (Chalid & Yusuf, 2014).

Nurske dalam teorinya menyatakan bahwa kemiskinan memiliki tiga penyebab dasar yang saling terkait: ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal yang mengakibatkan produktivitas rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah (Kuncoro, 2006). Kemiskinan dapat dianalisis melalui aspek sosial dan ekonomi yang saling terkait, dengan penyebabnya mencakup:

- a) Keterbatasan dalam kemampuan menghubungkan individu dengan lapangan pekerjaan berdampak pada tingkat kesempatan kerja, yang merupakan perbandingan antara jumlah orang yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja.
- b) Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses faktor produksi seperti modal usaha, pasar, dan kepemilikan memiliki dampak yang signifikan.

Kemiskinan yang dilihat dari aspek akses sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik. Pendidikan yang kurang dapat menurunkan kemampuan produktivitas seseorang, sehingga berdampak pada pendapatan yang rendah.
- 2) Keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai.

Faktor-faktor lain yang turut berperan dalam menciptakan kondisi kemiskinan meliputi tingkat pendapatan yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, ketidakberadaan dalam kondisi *full-employment* yang mengakibatkan ketidakpastian penghasilan, tingkat pendidikan yang masih rendah, ketidakmampuan memiliki tempat tinggal, serta standar kesehatan dan gizi yang rendah (Rejekiingsih, 2011).

#### **d. Dampak Kemiskinan**

Kemiskinan di suatu wilayah memiliki implikasi yang luas dan saling terkait, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dampak dari keberadaan kemiskinan di suatu wilayah adalah sebagai berikut (Sukarno, 2000):

##### **1) Pengangguran**

Salah satu dampak utamanya adalah pengangguran, yang bukan hanya merupakan faktor penyebab kemiskinan tetapi juga menjadi konsekuensi langsung dari kemiskinan tersebut. Kondisi di mana sebagian besar masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi.

##### **2) Kriminalitas**

Keterbatasan finansial yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang kurang beruntung dapat memperbesar peluang terjadinya aktivitas kriminal. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan mendesak untuk memenuhi keperluan dasar hidup yang tidak terpenuhi, yang mungkin mendorong mereka untuk mencari cara-cara yang kurang sah untuk memenuhinya. Akibatnya, tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, dan bahkan tindak kekerasan seperti pembunuhan menjadi pilihan yang dianggap sebagai solusi.

### 3) Sulit Memperoleh Akses Pendidikan

Kondisi kemiskinan yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mencakup kekurangan dana untuk mendapatkan pendidikan. Hambatan akses terhadap pendidikan yang disebabkan oleh kendala finansial ini berpotensi mengakibatkan dampak negatif jangka panjang akibat kemiskinan.

Dampak yang timbul akibat tingginya tingkat kemiskinan di suatu wilayah pada akhirnya akan mengakibatkan kehidupan masyarakat terjauh dari kesejahteraan dan kualitas hidup yang optimal. Situasi tersebut merujuk kepada tujuan utama pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemiskinan beserta implikasinya akan menghambat kemajuan proses pembangunan yang sedang berlangsung.

#### **e. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam Ibnu Khaldun**

Dalam sudut pandang Islam, kemiskinan memiliki interpretasi yang berbeda dibandingkan dengan pandangan konvensional. Konseptualisasi kemiskinan dalam Islam dikelompokkan menjadi dua kategori utama: fakir dan miskin. Menurut pandangan mazhab Syafii dan Hambali, fakir merujuk kepada individu yang tidak memperoleh penghasilan dikarenakan uzur syar'i, seperti usia tua atau keterlibatan aktif dalam dakwah yang menghalangi kesempatan untuk mencari nafkah. Sementara itu, orang miskin dalam perspektif yang sama didefinisikan sebagai individu yang tidak mampu

memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, meskipun memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan (Maulana et al., 2022).

Menurut Ibnu Khaldun, kemiskinan merupakan hasil dari kekacauan politik dalam masyarakat yang tidak sah karena kurangnya sistem demokrasi, yang pada gilirannya memunculkan berbagai tindakan kriminal. Kemiskinan tidak hanya berasal dari aspek ekonomi semata, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa dimensi moral, intelektual, sosial, demografi, dan politik memiliki dampak terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, penyelesaian yang efektif untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya berfokus pada perbaikan ekonomi, tetapi juga memerlukan perbaikan dalam berbagai sektor yang mencakup aspek-aspek tersebut (Herdianto & Huda, 2022).

Merujuk dari sudut pandang Islam, kemiskinan ditekankan oleh upaya mereka yang termasuk dalam kategori kelompok kaya untuk memperhatikan, mengayomi, dan melindungi orang miskin (Syauqi Beik & Dwi Arsiyanti, 2016). Hal ini juga dijelaskan dalam dalam QS. 107 : 1-3 yang berbunyi :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ ١ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ٢ وَ لَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ٣

Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?,Maka itulah orang yang menghardik anak yatim,dan tidak mengajak memberi makan orang miskin ” (Departemen Agama RI, 2007).

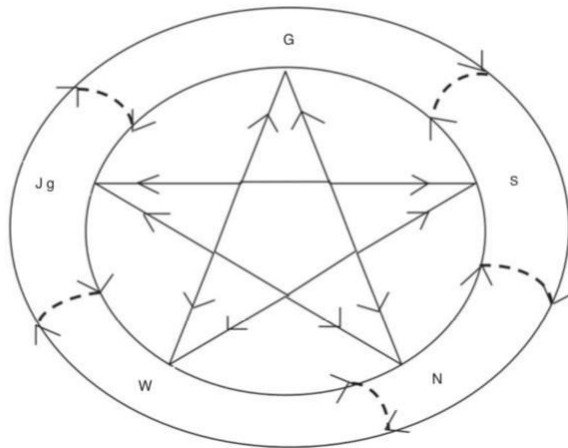
Dinyatakan dalam ayat tersebut bahwa seseorang yang memiliki kemampuan namun tidak membagi-bagikan kekayaannya kepada orang-

orang yang kurang mampu dianggap sebagai orang yang tidak mengikuti ajaran agama. Selanjutnya seorang cendekiawan Islam, Ibnu Khaldun, memandang kemiskinan sebagai konsep yang meliputi beragam aspek, tidak hanya terbatas pada dimensi ekonomi. Aspek-aspek tersebut meliputi hal-hal seperti moral, psikologis, politik, ekonomi, sosial, demografi, serta fenomena sejarah yang memengaruhi naik turunnya dinasti dan peradaban (Herdianto & Huda, 2022).

Konsep tersebut dibentuk dalam model dinamis Ibnu Khaldun yang tertulis dalam ucapannya dalam buku *Muqaddimah* yaitu (Herdianto & Huda, 2022) :

“Kekuatan kedaulatan (*al-Mulk*) tidak dapat dipertahankan kecuali dengan menerapkan syariah [...]”: Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh seorang yang berdaulat (*al-mulk*): kedaulatan tidak akan memperoleh kekuatan kecuali jika didukung oleh sumber daya manusia (*ar Rijal*): sumber daya manusia tidak dapat dipertahankan kecuali harta (*al-mal*): harta tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al' Emirat*): pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan (*al' adl*): suatu ukuran Keadilan (*al mizan*) yang digunakan Tuhan untuk menilai manusia dan berdaulat mengandung muatan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan”.

Ilustrasi dalam menggambarkan konsep dinamis Ibnu Khaldun tertuang pada gambar berikut ini :



**Gambar 1. Lingkaran Keadilan**

Sumber : (Herdianto & Huda, 2022)

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa teori kemiskinan dalam kerangka berpikir Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut:

$P = f(W, G, N, S, g \text{ dan } j)$

Yaitu kemiskinan (P) adalah fungsi dari kekayaan negara (W), Pemerintah (G), Sumber Daya Manusia atau Masyarakat (N), Syariah (S), Konstruksi (g) dan juga keadilan (j). Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, politik, agama, dan keadilan yang saling berinteraksi dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu masyarakat (Herdianto & Huda, 2022).

## **2. Pertumbuhan Ekonomi**

### **a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada perubahan berkelanjutan dalam keadaan perekonomian suatu negara yang menuju peningkatan kondisi yang lebih baik selama jangka waktu tertentu (Yunianto, 2021). Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena di mana terjadi peningkatan pada produk domestik bruto riil atau pendapatan nasional riil. Dengan demikian, perkembangan ekonomi terjadi ketika terdapat peningkatan dalam output riil. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan peningkatan standar hidup yang diukur melalui output riil per individu (Ridwan. & Nawir, 2021). Terdapat beberapa definisi terkait pertumbuhan ekonomi :

- a) Menurut Kuznets dalam penelitian (Khamdana, 2016), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dalam kapasitas suatu negara untuk memberikan berbagai jenis barang ekonomi kepada penduduknya, yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukan.
- b) Menurut penafsiran Sukirno, pertumbuhan ekonomi merujuk pada perkembangan aktivitas ekonomi yang menghasilkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu masyarakat, serta

meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Hellen et al., 2017).

- c) Subandi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa memperhatikan apakah peningkatan tersebut melebihi atau kurang dari laju pertumbuhan penduduk, atau apakah ada perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak (Muhamad Rofii & Sarda Ardyan, 2017).

#### **b. Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

Penentuan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari pertambahan aktual dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu, untuk menilai pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, diperlukan perhitungan pendapatan nasional riil yang mencakup dua hal yaitu (Dwi Puspa Hambarsari & Kunto Inggit, 2016) :

##### **1. Produk Domestik Bruto**

Menurut Mankiw dalam penelitian (Sapthu, 2013) Indikator yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan pertumbuhan keseluruhan pendapatan yang dihasilkan oleh semua individu dalam suatu perekonomian.

Produk Domestik Bruto (PDB) merujuk pada jumlah pendapatan dan pengeluaran total suatu negara atas barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. PDB digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara, dimana peningkatan nilai PDB menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Meskipun faktor-faktor yang mempengaruhi PDB sangatlah beragam, teori Keynes dalam penelitian (Sapthu, 2013) mengidentifikasi empat faktor utama yang secara positif mempengaruhi PDB, yaitu konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto (NX). Namun, faktor-faktor ini juga dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti tingkat pendapatan, tingkat harga, suku bunga, tingkat inflasi, persediaan uang, nilai tukar, dan faktor-faktor lainnya.

## 2. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Todaro dan Smith dalam penelitian (Shaulim, 2018), Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh semua entitas ekonomi di suatu wilayah atau total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di wilayah tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diindikasikan oleh peningkatan dalam pertumbuhan PDRB, diukur dengan harga yang konstan seiring waktu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat berfungsi sebagai indikator pertumbuhan yang lebih akurat dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk, karena cakupan perhitungan PDRB lebih terfokus dibandingkan dengan perhitungan PDB. PDRB hanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dalam skala regional, biasanya di tingkat provinsi atau kabupaten (Dwi Puspa Hambarsari & Kunto Inggit, 2016).

**c. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Ibnu Khaldun)**

Dalam konteks Islam, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses evolusi yang berkelanjutan dari faktor-faktor produksi yang tepat, yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan manusia. Dalam perspektif ini, pertumbuhan ekonomi dianggap memiliki dimensi nilai yang penting. Suatu peningkatan dalam faktor-faktor produksi tidaklah dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan barang dan jasa secara keseluruhan, misalnya melibatkan barang-barang yang terbukti merugikan dan mengancam kesejahteraan manusia (Muttaqin, 2018). Dalam pemahaman ini, pembangunan ekonomi menurut ajaran Islam melibatkan beragam aspek, baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Tujuannya tidak hanya terbatas pada kemakmuran materi di dunia, tetapi juga mencakup kebahagiaan spiritual di akhirat (Fitria, 2016).

Ibnu Khaldun dalam karyanya yang berjudul "*Al-Muqaddimah*" mengungkapkan bahwa motif ekonomi muncul karena keinginan manusia yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka, sementara sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Oleh karena itu, pemahaman tentang motif ekonomi harus dipertimbangkan dari dua perspektif, yaitu sudut pandang tenaga (*werk, arbeid*) dan sudut pandang penggunaannya (Hidayatullah, 2018).

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekayaan suatu negara tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dimilikinya, melainkan lebih ditentukan oleh tingkat produksi dan surplus dalam neraca pembayaran. Jika sebuah negara mencetak uang dalam jumlah besar tanpa memperhatikan pertumbuhan sektor produksi, maka kelebihan uang tersebut akan kehilangan nilainya. Fokus pada pengembangan sektor produksi menjadi kunci dalam pembangunan sebuah negara karena sektor produksi dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menggerakkan permintaan terhadap produk lainnya. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mengemukakan bahwa dalam pendekatan *socio-historis*, fenomena sosial saling terkait dengan fenomena lainnya. Fenomena ekonomi, secara khusus memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan budaya dan berdampak besar terhadap eksistensi serta perkembangan suatu negara. Seorang penulis harus memperhatikan dua realitas yang dikaji, yaitu realitas ekonomi dan geografis, serta realitas psikis atau mental-spiritual (Ridwan et al., 2022).

Menurut Ibn Khaldun, setiap suatu Negara akan cenderung lebih menyeimbangkan kondisi ekonomi mereka dengan cara membuat penyesuaian antara permintaan agregat dan penawaran agregat (Maleha, 2016). Ini dijelaskan terkait pernyataan Ibnu Khaldun :

“Pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri satu sama lain saling menuju keseimbangan. Apabila pendapatan kota itu besar, maka pengeluarannya juga besar dan demikian pula sebaliknya. Kemudian, apabila kedua-duanya (pendapatan dan pengeluaran) besar, maka penduduknya sungguh sangat menikmati situasi ini, dan kota itu pun menjadi tumbuh berkembang.”

Argumentasi yang disajikan oleh Ibn Khaldun mengenai tingkat kekayaan dan keseimbangan ekonomi makro serupa dengan konsep efek multiplier dari tenaga kerja efektif yang dijelaskan dalam teori Keynes. Ketika sebuah negara memiliki pendapatan dan pengeluaran yang tinggi, hal ini akan menarik banyak orang untuk datang ke negara tersebut. Dampaknya adalah peningkatan permintaan agregat yang mendorong peningkatan produksi output, sehingga pada akhirnya pendapatan negara tersebut meningkat lebih lanjut (Maleha, 2016).

Ibnu Khaldun mementingkan peran tenaga kerja sebagai aset yang berharga dalam pembangunan ekonomi. Baginya, tanpa kontribusi tenaga kerja, akumulasi modal dan pendapatan tidak dapat dicapai. Dalam pandangannya, tenaga kerja merupakan sumber nilai yang vital dalam ekonomi pasar, di mana keduanya saling bergantung satu sama lain. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa faktor utama yang menentukan struktur

ekonomi adalah kerja buruh yang memiliki keterampilan (Hidayatul, 2017).

Mengenai hal tersebut Ibnu Khaldun menjelaskan dalam Muqaddimah-nya :

*“Some crafts are partly associated with other (crafts). Carpentry and weaving, for instance, are associated with wood and yarn (and the respective crafts needed for their production). However, in the two crafts (first mentioned), the labor (that goes into them) is more important, and its value is greater. If the profit results from something other than a craft, the value of their resulting profit and acquired (capital) must (also) include the value of the labor by which it was obtained. Without labor, it would not have been acquired.”*

Artinya : “Beberapa kerajinan sebagiannya terkait dengan (kerajinan) yang lain. Pertukangan dan tenun, misalnya, berhubungan dengan kayu dan benang (dan kerajinan masing-masing diperlukan untuk produksi mereka). Namun, dalam dua kerajinan (yang pertama kali disebutkan), tenaga kerja (yang masuk ke mereka) lebih penting, dan nilainya jauh lebih besar”.

Ibnu Khaldun mengungkapkan pentingnya kontribusi para pekerja dalam proses pembuatan kerajinan sebagai elemen nilai yang esensial. Dia menegaskan bahwa nilai kerja ini harus diakui dan dimasukkan ke dalam perhitungan biaya produksi karena kerajinan tersebut tidak akan dapat diproduksi tanpa kontribusi buruh. Dengan demikian, keterampilan para pekerja menjadi sumber nilai yang penting dalam hasil produksi. Hal ini mencerminkan hubungan kausalitas yang fundamental dalam konteks ekonomi, baik dalam skala makro maupun mikro (Hidayatul, 2017). Ibnu Khaldun menganggap sistem ekonomi islam sebagai sistem yang terdiri dari komponen dan sumber komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi (Nurhayadi et al., 2023). Ibnu Khaldun juga menganggap bahwa kehidupan perekonomian menjamin terjadinya proses saling memberi

antara sektor atau antara produsen ke konsumen dalam kesempatan yang sama (Maleha, 2016).

### **3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

#### **a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu ukuran perbandingan yang mempertimbangkan harapan hidup, tingkat melek huruf, akses pendidikan, dan standar hidup seluruh negara di dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan status suatu negara sebagai negara maju, berkembang, atau tertinggal, serta untuk mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakat (Anggraeni, 2018). *United Nations Development Programme* (UNDP) menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan dan kebebasan individu dalam menentukan pilihan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan penghargaan terhadap keberadaan mereka sebagai manusia. Kebutuhan dasar ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan yang baik dan umur panjang, serta kemampuan untuk mengakses sumber daya yang diperlukan guna mencapai standar hidup yang layak (Septiarini, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran komposit yang dihitung dari rata-rata mencakup Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak yang dihitung dengan

memperhitungkan Paritas Daya Beli. Sejak pemberlakuan otonomi daerah, diharapkan setiap wilayah dapat mengukur IPM lokalnya sendiri. Hal ini penting untuk perencanaan dan evaluasi, khususnya dalam memantau kemajuan dan distribusi hasil pembangunan dalam bidang kesejahteraan manusia (Siswati & Hermawati, 2018).

#### **b. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada tiga dimensi dalam proses perhitungannya, yaitu (Yektiningsih, 2018):

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*). Aspek kesehatan dan harapan hidup, yang tercermin dalam tingkat angka harapan hidup, sebagai parameter kesehatan dengan indikator harapan hidup, menilai kesejahteraan dan masa hidup yang panjang.
2. Pengetahuan (*knowledge*). Edukasi yang diukur dengan rata-rata tingkat melek huruf dan durasi pendidikan, sebagai parameter pendidikan dengan tingkat melek huruf dan durasi belajar, mengevaluasi individu yang cerdas, inovatif, terampil, dan berbudi pekerti.
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*). Pendapatan yang diukur dengan kemampuan beli masyarakat, sebagai parameter pendapatan dengan indikator kemampuan beli masyarakat, menilai individu yang mandiri dan memiliki akses yang layak.

Dengan menerapkan pendekatan inovatif, variabel dalam IPM metode 2014 secara terperinci dapat disajikan dalam pembahasan berikut ini (BPS Kebumen, 2021) :

- a) Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), yang juga dikenal sebagai Harapan Hidup (*life expectancy -e0*), adalah ukuran yang mencerminkan rata-rata tahun-tahun yang diharapkan seseorang akan hidup sejak lahir, menggambarkan kesehatan masyarakat. Perhitungan AHH berdasarkan data sensus dan survei populasi.
- b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh individu dalam pendidikan formal. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa tidak akan ada penurunan dalam rata-rata tahun-tahun sekolah suatu wilayah. Penghitungan RLS meliputi populasi berusia 25 tahun ke atas.
- c) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) merujuk pada lamanya pendidikan yang diharapkan oleh anak pada usia tertentu di masa depan. Perhitungan HLS berdasarkan asumsi bahwa peluang anak untuk tetap bersekolah pada usia yang berbeda sama dengan peluang populasi saat ini. Penghitungan HLS melibatkan populasi usia 7 tahun ke atas.
- d) Pengeluaran per kapita disesuaikan dihitung dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan *Purchasing Power Parity* (PPP). Rata-rata

pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari data Susenas, yang disesuaikan dengan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Perhitungan ini mencakup 96 komoditas, dengan 66 di antaranya adalah makanan dan sisanya adalah komoditas non-makanan.

Sebelum digunakan dalam perhitungan IPM, setiap elemen komponen IPM disesuaikan dengan nilai minimum dan maksimum sesuai standar. Berikut adalah rumus yang digunakan (BPS Kebumen, 2021):

Dimensi Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Dimensi pendidikan

$$I_{\text{HSL}} = \frac{HSL - HSL_{\min}}{HSL_{\max} - HSL_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RSL - RSL_{\min}}{RSL_{\max} - RSL_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HSL}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

### Dimensi Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Keterangan:

I : Indeks

AHH : Angka Harapan Hidup

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Setelah semua perhitungan selesai, rumus standar yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

I<sub>kesehatan</sub> = Indeks Kesehatan

I<sub>pendidikan</sub> = Indeks Pendidikan

I<sub>pengeluaran</sub> = Indeks Pengeluaran

Untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perlu ada nilai minimum dan maksimum untuk setiap indikator. Berikut adalah tabel yang memuat nilai-nilai tersebut:

**Tabel 16**

**Kriteria Komponen Pembangunan Manusia**

| Komponen IPM                      | Satuan | Minimum        |                   | Maksimum            |                    |
|-----------------------------------|--------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                                   |        | UNDP           | BPS               | UNDP                | BPS                |
| Angka harapan hidup saat lahir    | Tahun  | 20             | 20                | 85                  | 85                 |
| Angka harapan lama sekolah        | Tahun  | 0              | 0                 | 18                  | 18                 |
| Rata-Rata lama sekolah            | Tahun  | 0              | 0                 | 15                  | 15                 |
| Pengeluaran perkapita disesuaikan |        | 100<br>(PP US) | 1.007.436<br>(RP) | 107.721<br>(PPP US) | 26.572.352<br>(RP) |

Sumber:(BPS Kebumen, 2021)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengembangkan konsep Pembangunan Manusia yang mengukur kinerja pembangunan manusia dalam skala 0,0 hingga 100,0. Kategori yang ditetapkan adalah sebagai berikut (BPS Kebumen, 2021):

Sangat Tinggi : IPM > 80

Tinggi : IPM antara 70 < IPM < 80

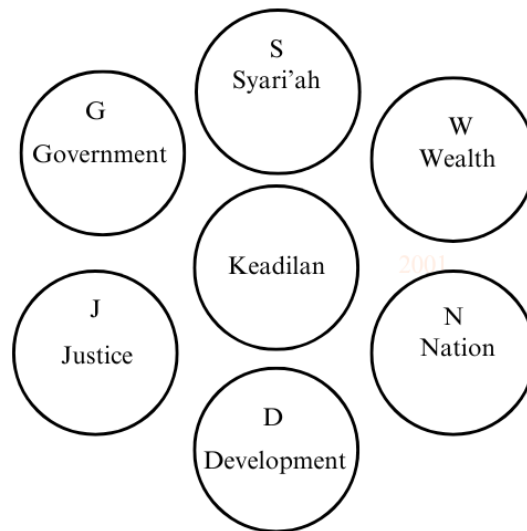
Sedang : IPM antara 60 < IPM < 70

Rendah : IPM < 60

**c. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Ibnu Khaldun)**

I-HDI (*Islamic Human Development Index*) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai pembangunan manusia dalam perspektif Islam. I-HDI mengukur tingkat kesejahteraan manusia dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang diperlukan agar manusia bisa mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat (*falah*). Menurut al-Syatibi, ada lima aspek kebutuhan dasar yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia, yakni agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*). Semua ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara mutlak agar manusia bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, atau terpenuhi dengan tidak seimbang, maka kebahagiaan hidup manusia juga tidak akan tercapai dengan sempurna (Rafsanjani, 2018).

Pembangunan menurut Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kemajuan ekonomi memiliki peran sentral dalam memastikan kelangsungan hidup dan kemajuan masyarakat. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini (Fitriani, 2019):



**Gambar 2 Kerangka Kesejahteraan dalam konsep Lingkaran Keadilan Ibnu Khaldun**  
Sumber : (Fitriani, 2019)

$G = (S, N, W, D, J)$

Di mana :

G = *Government* (pemerintah) = الملك

S = *Syari'ah* = الشريعة

W = *Wealth* (kekayaan/ekonomi) = الأموال

N = *Nation* (masyarakat/rakyat) = الرجال

D = *development* (pembangunan) = عمارة

J = *Justice* (Keadilan) = العدل

Gambar tersebut dibaca sebagai berikut :

- a) Pemerintah (G) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi Syari'ah (S).
- b) Syari'ah (S) tidak dapat diwujudkan kecuali oleh pemerintah/penguasa (G).
- c) Pemerintah (G) tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali oleh masyarakat (N).
- d) Pemerintah (G) yang kokoh tidak terwujud tanpa ekonomi yang tangguh.
- e) Masyarakat (N) tidak dapat terwujud kecuali dengan ekonomi/kekayaan.
- f) Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (D).
- g) Pembangunan (D) tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (J)
- h) Penguasa atau pemerintah (G) bertanggung jawab mewujudkan keadilan (J).

Dalam perspektifnya, pembangunan ekonomi tidak terbatas pada kadar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi kesejahteraan manusia secara holistik. Konsep pembangunan ekonomi dalam model Ibnu Khaldun mencakup berbagai variabel yang saling terkait dan berinteraksi untuk meningkatkan kesejahteraan. Variabel tersebut termasuk Pemerintah (G), Syariah (S), Masyarakat (N), Kekayaan (W), Keadilan (j), dan elemen-elemen lain yang

relevan. Pembangunan ekonomi dalam paradigma Ibnu Khaldun bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan hakiki manusia serta kemajuan dalam peradaban. Dengan kata lain, tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan politik suatu masyarakat (Hanafiah, 2009).

Dari sejumlah variabel yang disebutkan, variabel pembangunan (g) dan keadilan (j) memerlukan fokus yang lebih intensif. Pembangunan memainkan peran krusial dalam kemajuan dan perkembangan masyarakat; tanpanya, kemajuan tersebut tidak mungkin tercapai. Namun, kebermaknaan pembangunan tidak akan terwujud tanpa adanya keadilan. Oleh karena itu, diperlukan konsep keadilan distributif guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang adil (Hidayatul, 2017).

Apabila kita menggabungkan setiap variabel tersebut, relasi fungsional dapat tercermin dalam formula  $G = f(S, N, W, g, \text{ dan } j)$ , di mana G merupakan fungsi dari variabel (S, N, W, g, dan j). Variabel G ditempatkan sebagai variabel dependen, karena dalam konteks ini, G mewakili kelangsungan peradaban, keberhasilan, atau kemunduran/keruntuhan, yang dipengaruhi oleh lima variabel tersebut. Dengan simpelnya, hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah (G) memiliki tanggung jawab untuk menerapkan syari'ah (S), karena tanpa syari'ah, masyarakat akan mengalami kekacauan dan negara akan mengalami keruntuhan. Selain itu, negara juga harus menjamin hak-hak

masyarakat dan bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (N) agar mereka dapat mencapai tingkat kesejahteraan atau kemakmuran (W) melalui pembangunan (g) yang adil. Jika variabel-variabel ini tidak dipenuhi, maka keberlangsungan kekuasaan akan menjadi semakin rapuh (Hidayatul, 2017).

Dalam lingkaran keadilan yang dicetuskan oleh Ibnu Khaldun terdapat variabel W yaitu ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan manusia, dimana hal ini dijelaskan (Fitriani, 2019) :

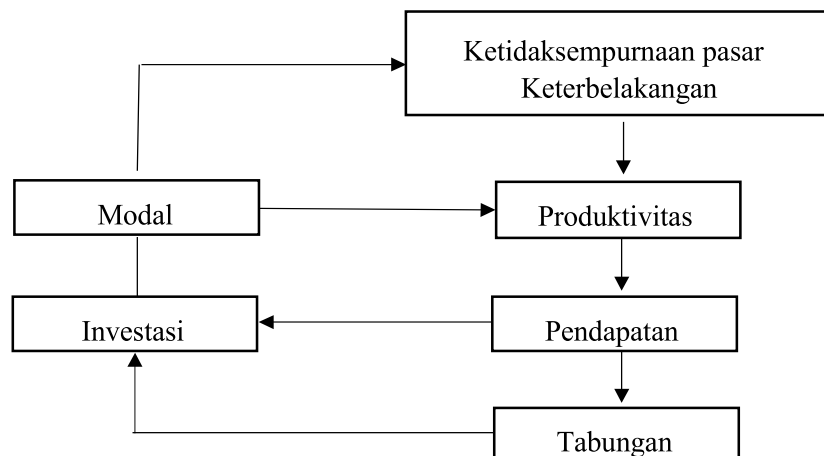
- 1) Suatu negara bisa memulai dengan menggalakkan pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah melalui pendekatan pengembangan studi, sosialisasi, dan praktik dalam kehidupan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan umum, yang pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk membayar zakat, infaq, sedekah, dan waqaf guna mencapai keadilan ekonomi.
- 2) Ketika masyarakat Islam mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi, mereka dapat mengalokasikan sumber daya untuk membangun infrastruktur seperti lembaga pendidikan, pusat pelatihan, tempat ibadah, hotel syariah, pusat perdagangan, fasilitas industri, dan infrastruktur transportasi yang menghubungkan sektor produksi, dengan tujuan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Keberhasilan dalam penguatan ekonomi juga dapat membawa dampak positif pada kekuasaan politik suatu negara.

Pembangunan tidak dapat terlaksana secara efektif tanpa adanya prinsip keadilan yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, bukan hanya dalam konteks ekonomi semata. Konsep keadilan dalam dimensi yang lebih luas ini mencakup upaya untuk menciptakan masyarakat yang berperilaku inklusif, memastikan kesetaraan sosial, serta menjamin keamanan, hak-hak kepemilikan, dan penghormatan terhadap martabat individu. Hal ini melibatkan kewajiban politik dan ekonomi yang jujur, pemberian upah yang adil kepada semua pekerja, dan pencegahan terhadap segala bentuk penindasan atau eksploitasi (Hanafiah, 2009).

#### **4. Hubungan Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Teori yang menghubungkan keterkaitan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia adalah teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Nurkse pada tahun 1953. Teori tersebut menyatakan bahwa kemiskinan tidak memiliki awal atau akhir, di mana semua faktor yang menyebabkan kemiskinan saling terkait satu sama lain (Nurjihad & Dharmawan, 2016).



**Gambar 3. Lingkaran Setan Kemiskinan**

Sumber : (Nurjahidi & Dharmawan, 2016)

Menurut teori Lingkaran Setan Kemiskinan, penyebab kemiskinan meliputi beberapa faktor. Pertama, pada tingkat makro, kemiskinan muncul karena ketidakseimbangan dalam pola kepemilikan sumber daya, yang menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan berkualitas rendah. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan produksi yang rendah dan pada gilirannya mengakibatkan upah yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau faktor keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses terhadap modal (Lindrianti, 2022).

Kemiskinan mengacu pada keadaan di mana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan

(Kuncoro, 2006). Lingkaran kemiskinan menggambarkan situasi di mana kekurangan sumber daya ini menciptakan kondisi yang membuat sulit bagi individu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam lingkaran ini meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, kurangnya kesempatan kerja, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu (Ridwan. & Nawir, 2021). Pertumbuhan ekonomi yang rendah sering kali menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan yang berkelanjutan. Di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, pendapatan per kapita cenderung *stagnan* atau bahkan menurun, yang berarti sumber daya yang tersedia untuk investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat terbatas. Akibatnya, masyarakat di negara-negara ini sering kali terjebak dalam kemiskinan karena tidak adanya peluang untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan mereka.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan manusia di suatu negara berdasarkan tiga dimensi utama yaitu kesehatan (diukur melalui harapan hidup), pendidikan (diukur melalui tingkat melek huruf dan lama sekolah), dan standar hidup (diukur melalui pendapatan per kapita) (Yektiningsih, 2018). IPM yang rendah menunjukkan bahwa suatu negara memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah

dalam ketiga dimensi tersebut. Rendahnya IPM sering kali merupakan cerminan dari kemiskinan yang meluas dan pertumbuhan ekonomi yang terhambat.

Teori lingkaran kemiskinan menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan IPM. Kemiskinan menyebabkan rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi karena masyarakat tidak memiliki keterampilan dan kesehatan yang cukup untuk berkontribusi secara produktif dalam perekonomian (Chairunnisa & Qintharah, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang rendah berarti pendapatan per kapita tetap rendah, yang membatasi investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan IPM (D. I. Ginting et al., 2023). Rendahnya IPM, pada gilirannya, memperburuk kemiskinan karena individu tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk keluar dari keadaan miskin.

Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan dapat berlanjut dan memperburuk dirinya sendiri melalui proses yang berulang, di mana keterbelakangan dan ketertinggalan menjadi faktor yang memperparah kemiskinan. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dan tidak inklusif dapat memperparah kemiskinan, sedangkan indeks pembangunan manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan dan inklusivitas dapat mengabaikan kemiskinan.

## B. Telaah Pustaka

Beberapa studi sebelumnya tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia telah dikaji secara mendalam, sehingga beberapa temuan dari penelitian sebelumnya dapat menjadi landasan bagi penelitian ini. Adapun hasil dari kajian penelitian terdahulu yaitu :

1. Lora Ekana Nainggolan, Lenny Dermawan Sembiring, dan Nana Triapnita Nainggolan dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang Berdampak pada Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga tidak memiliki dampak signifikan terhadap IPM maupun kemiskinan. Sebaliknya, IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Nainggolan et al., 2021).
2. Syofya dalam penelitiannya yang berjudul *Effect of Poverty and Economic Growth on Indonesia Human Development Index*. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Temuan dari penelitian menyatakan bahwa kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia (Heppi, 2018).

3. Ningrum dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. Penelitian tersebut menerapkan analisis deskriptif dan regresi data panel untuk menyajikan temuan bahwa semua variabel yang diselidiki secara bersama-sama memiliki dampak yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun demikian, secara individu, kemiskinan dan pengangguran diakui memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap IPM (Ningrum et al., 2020).
  
4. Magdalena Laode, Daisy S.M. Engka, dan Jacline I. Sumua analisis dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018). Penelitian menggunakan metode *random effect* pada model regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara kemiskinan dan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berdampak negatif dan signifikan terhadap IPM. Variabel-variabel tersebut juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2015-2018 (Laode et al., 2020).

5. Anindya Rahardian Nugraeni dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Ketrgantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Penghitungan pada regresi data panel memperlihatkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap IPM dan Rasio Ketergantungan memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. Variabel Ke miskinian, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Ketergantungan memiliki pengaruh yang simultan dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur periode 2014 – 2019 (Nugraeni, 2021).
6. Widya Usi Ayu Wulan Anggraeni dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Produk Domestik Bruto, Ekspor, Impor, dan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2015-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis linier berganda yang diolah menggunakan IBM SPSS Statistic 25. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan terdapat pengaruh produk domestik bruto (PDB), ekspor impor, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran, hal itu terbukti dari nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$  dan F hitung sebesar  $3,572 > F \text{ tabel } 2,71$  dan berkontribusi pengaruh sebesar 6,1% terhadap tiingkat pengangguran. Secara parsial ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yaitu produk domestik bruto (PDB) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,003 < 0,05$  dan t hitung sebesar  $1,748 > t \text{ tabel}$

1,703 sedangkan variabel ekspor mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,004 < 0,05$  dan  $t$  hitung sebesar  $1,794 > t$  tabel 1,703. Beberapa variabel lainnya menunjukkan bahwa hasilnya tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yaitu variabel impor dengan nilai signifikansinya sebesar  $0,152 > 0,05$  dan  $t$  hitung sebesar  $0,084 < t$  tabel 1,703 dan variabel pertumbuhan ekonomi yang memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,816 > 0,05$  dan  $t$  hitung sebesar  $0,235 < t$  tabel 1,703 (Widya Usi Ayu Wulan, 2023).

**Tabel 17**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti atau Judul                                                                                                                                                                                                 | Metode Penelitian | Persamaan                                      | Perbedaan                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lora Ekana Nainggolan, Lenny Dermawan Sembiring, dan Nana Triapnita Nainggolan: Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang Berdampak pada Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara | Kuantitatif       | Penelitian ini menggunakan variabel yang sama. | Waktu dan lokasi penelitian.<br><br>Fokus permasalahan yang mendasari penelitian dilakukan, analisis yang digunakan dalam perspektif ekonomi islam Ibnu Khaldun |
| 2. | Heppi Syofya: <i>Effect of Poverty and Economic Growth on Indonesia Human Development Index</i>                                                                                                                     | Kuantitatif       | Penelitian ini menggunakan variabel yang sama. | Waktu dan lokasi penelitian.<br><br>Fokus permasalahan yang mendasari penelitian dilakukan, analisis yang                                                       |

| No | Peneliti atau Judul                                                                                                                                                                                                         | Metode Penelitian | Persamaan                                    | Perbedaan                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                              | digunakan dalam prespektf ekonomi islam ibnu khladun.                                                                                                                      |
| 3. | Ningrum: Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018                                                   | Kuantitatif       | Adanya variabel yang sama dalam penelitian.  | Tingkat pengangguran di Indonesia dan pengeluaran pemerintah saat ini adalah variabel independen lain yang digunakan dalam penelitian ini.<br>Waktu dan lokasi Penelitian. |
| 4. | Magdalena Laode, Daisy S.M. Engka, dan Jacline I. Sumual : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018) | Kuantitatif       | Ada variabel yang sama dalam penelitian ini. | Variabel independen tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengeluaran pemerintah untuk pendidikan.                                                   |

| No | Peneliti atau Judul                                                                                                                                                   | Metode Penelitian | Persamaan                                                                            | Perbedaan                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                      | Fokus permasalahan penelitian, analisis yang digunakan dalam perspektif ekonomi islam ibnu khladun                                                                       |
| 5. | Anindya Rahardian Nugraeni : Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Ketrgantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur                               | Kuantitatif       | Metodologi penelitian yang dipakai.                                                  | Variabel independen tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio ketergantungan. Fokus permasalahan penelitian.                                             |
| 6  | Widya Usi Ayu Wulan Anggraeni : Pengaruh Produk Domestik Bruto, Ekspor, Impor, dan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2015-2022 | Kuantitatif       | Metode penelitian yang dipakai, adanya variabel yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi. | Waktu dan lokasi penelitian. Fokus permasalahan yang mendasari penelitian dilakukan, variabel dependent dan independent yang dilakukan dalam penelitian terbaru berbeda. |

### C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu bentuk jawaban awal terhadap perumusan masalah penelitian yang telah diformulasikan dalam bentuk pertanyaan. Ini disebut sebagai jawaban awal karena didasarkan pada teori-teori yang relevan, namun belum diperkuat oleh bukti empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis dapat dianggap sebagai respons teoritis terhadap perumusan masalah penelitian, bukan sebagai jawaban yang berdasarkan data empiris (Abdullah & Saebani, 2014).

Pada penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang akan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya, dan berikut merupakan hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu:

#### 1. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), kemiskinan bisa berasal dari keterbatasan dalam memperoleh sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta kesulitan dalam mengakses pendidikan dan lapangan pekerjaan. Karena itu, tingkat kemiskinan dapat berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Chalid & Yusuf, 2014).

Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keadilan yang tidak terpenuhi dapat meningkatkan kemiskinan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ketika kemiskinan meningkat, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan

dasar lainnya akan berkurang, yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan pembangunan manusia (Khalidun, 1986). Jadi, berdasarkan pandangan ini, kemiskinan dapat secara signifikan mempengaruhi IPM melalui dampaknya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.

Jika disimpulkan, semakin rendah tingkat kemiskinan, maka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan manusia akan semakin besar. Hal ini karena dengan berkurangnya kemiskinan, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi individu untuk mencapai potensi mereka secara penuh.

Menurut penelitian yang diselenggarakan oleh Novita Dewi, kekurangan ekonomi memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (N. Dewi, 2017). Berdasarkan hal tersebut jadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

$H_0$  : Kemiskinan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y$ ) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

$H_1$ : Kemiskinan ( $X_1$ ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y$ ) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

## 2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi yang sedang berkembang, fokus utama adalah pada peningkatan kapasitas produksi sumber daya manusia dalam proses pembangunan, yang juga dikenal sebagai *investment in human capital*. Ini mengimplikasikan bahwa meningkatnya kemampuan individu dalam masyarakat menjadi poin sentral yang paling efektif dalam memajukan pembangunan di suatu daerah (Suparno, 2015).

Ibnu Khaldun menjelaskan konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia melalui "teori lingkaran keadilan". Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kemakmuran dan stabilitas suatu negara tergantung pada keharmonisan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sehat akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Khaldun, 1986).

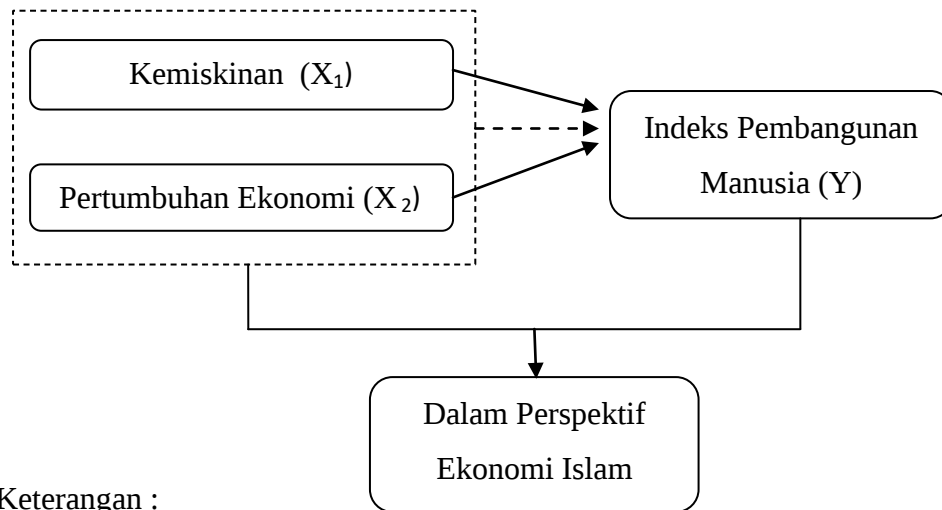
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Adelfina dan I Made di Jember, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Adelfina & Jember, 2016). Berdasarkan hal tersebut hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

$H_0$  : Pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y$ ) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

$H_2$  : Pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y$ ) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

#### D. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dan memperjelas aktivitas penelitian, kerangka berpikir dapat disajikan secara skematis sebagai berikut:



Keterangan :

————→ : Pengaruh Secara Parsial

-----→ : Pengaruh Secara Simultan

**Gambar 4. Kerangka Pikir**

Sumber : Data diolah Penulis